



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN  
KETUA RUKUN WARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Juncto Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, pemberian honorarium bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa pemberian honorarium bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) ditujukan untuk meningkatkan mutu, prestasi dan semangat kerja dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Honorarium Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 13);
16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 39 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 39);
17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 29);
18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 42);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2015.

### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Walikota ini, Pemerintah Kota Probolinggo memberikan honorarium kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) Dan Ketua Rukun Warga (RW) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.

### **Pasal 2**

Pemberian honorarium kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) Dan Ketua Rukun Warga (RW) Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kinerja Ketua Rukun Tetangga (RT) Dan Ketua Rukun Warga (RW) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya; dan
- b. menguatkan peranan Ketua Rukun Tetangga (RT) Dan Ketua Rukun Warga (RW) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dari Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

### **Pasal 3**

Pemberian honorarium kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) Dan Ketua Rukun Warga (RW) Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015.

**Pasal 4**

Biaya pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2015 pada pos masing-masing Kecamatan se Kota Probolinggo.

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 12 Juni 2015

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd**

**Hj. RUKMINI**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 12 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd**

**H. JOHNY HARYANTO**

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 26

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**



**TITIK WIDAYAWATI, SH M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014